

BAB III
POLA HUBUNGAN SIPIL MILITER ERA PERVEZ MUSHARRAF
TAHUN 2001-2007

Musharraf merupakan Presiden Pakistan yang memperoleh kekuasaan melalui kudeta militer dan berhasil memimpin selama tujuh tahun. Mengkaji terkait perilaku hubungan sipil-militer di Pakistan ketika Musharraf menjabat sebagai presiden sekaligus kepala militer di Pakistan, menjadi poin utama yang diangkat dalam bab ini. Penulis mencoba melihat bagaimana aktivitas sipil dan peran militer dalam panggung politik pemerintahan di Pakistan, mengingat bahwa *The Army Chief* merupakan kepala negara. Selain itu, hal-hal atau kondisi yang mempengaruhi dan menjadi penyebab dari pola hubungan sipil-militer yang terjadi pada tahun 2001-2007 juga ikut dibahas untuk dijadikan penunjang analisis.

3.1 Kegagalan Koalisi Sipil Militer

Kudeta militer pada tahun 1999 yang dilakukan oleh Jenderal Pervez Musharraf terhadap Perdana Menteri Pakistan saat itu yaitu Nawaz Sharif, dilatarbelakangi oleh berbagai macam hal, salah satunya karena memburuknya hubungan yang terjadi antara Nawaz Sharif dengan militer. Nawaz merupakan seorang sipil yang terpilih sebagai perdana menteri Pakistan pada 1990-1993 dan 1997-1999. Ketika Nawaz terpilih menjadi Perdana Menteri Pakistan untuk

pertama kalinya pada 1 November 1990, kemenangannya atas pemilihan yang mengalahkan PPP (*Pakistan Peoples Party*) merupakan dukungan kepemimpinan sipil dan militer. Dukungan militer negara karena Sharif merupakan pemimpin aliansi sayap kanan yang dikenal sebagai Islami Jamhoori Ittehad (IJI) merupakan gerakan yang disatukan oleh militer.⁸⁹ Dukungan ini menempatkan militer sebagai blok politik aktif yang mendukung partai-partai sipil dan kelompok kekuatan birokrasi lainnya yang mana menurut Janowitz, kondisi ini disebut dengan *civil-military coalition*.

Pada periode pertama Nawaz sebagai perdana menteri tepat dibulan Januari 1993, terjadi perbedaan pendapat antara Nawaz dengan Presiden Ghulam Ishaq Khan terkait pemilihan Panglima Militer Pakistan pasca meninggalnya Jenderal Asif Nawaz Janjua akibat serangan jantung. Selain itu terdapat sebuah pidato Nawaz Sharif yang disampaikan pada bulan April 1993 tentang ‘tidak ingin menerima perintah dari siapapun’, membuatnya berada pada konflik besar dengan pimpinan tinggi militer.⁹⁰ Karena dengan kata lain secara tidak langsung pernyataan tersebut mengasumsikan bahwa Nawaz tidak akan menerima masukan dan tidak mau menerima perintah ataupun pertimbangan dari pihak manapun terkait segala bentuk kebijakan yang dibuat. Hal ini tentu menimbulkan berbagai spekulasi dari pihak-pihak yang merasa bahwa Nawaz akan menjalankan pemerintahan dan membuat kebijakan tanpa mau menerima masukan dan saran dari manapun. Hal lainnya yang menjadi pemicu gagalnya hubungan baik yang

⁸⁹In pictures: The rise and fall of Nawaz Sharif, Published 13 April 2018, diakses melalui <https://www.dawn.com/news/1348024>, tgl 27/04/18 pkl 12.15 WIB

⁹⁰ Hasan Askari Risvi, *Nawaz Sharif's Predicament*, The Express Tribune edisi 4 April 2014, diakses melalui <https://tribune.com.pk/story/692158/nawaz-sharifs-predicament/> tgl 29/04/18 pkl 15.07 WIB.

sudah tercipta ini adalah Nawaz Sharif mulai mengganggu promosi pemindahan perwira senior termasuk terkait jabatan komandan korps. Tindakan Sharif ini tentu melanggar norma hubungan-sipil militer yang menekankan penghormatan terhadap otonomi militer.⁹¹

Pada periode kedua Nawaz Sharif menjadi Perdana Menteri, terjadi kegagalan manajemen hubungan sipil-militer dengan para petinggi militer periode pasca perang Kargil.⁹² Shahbaz Sharif yang merupakan saudara kandung dari Nawaz Sharif mengunjungi Washington dengan niat mencoba untuk memperoleh dukungan Amerika terkait demokrasi yang akan diterapkan di Pakistan. Namun ternyata dukungan ini tidak dapat menjamin pemerintahan sipil untuk tetap berkuasa.

Pada saat yang sama, Nawaz Sharif menerima telepon dari seseorang yang tidak diketahui identitasnya dan langsung membuatnya mengambil keputusan untuk menyingkirkan Jenderal Pervez Musharraf dan menggantinya dengan anak didiknya yaitu Jenderal Ziauddin sebagai Panglima militer.⁹³ Upaya pencegahan kedatangan Musharraf di Pakistan sebelum penggantian Kepala Militer pun dilakukan oleh Sharif. Salah satunya adalah pengalihan pesawat jet yang menjadi kendaraan Musharraf dari Sri Lanka menuju Karachi tidak diizinkan oleh petugas lalu lintas Bandar Udara Internasional Karachi dibawah negara pemerintah pusat

⁹¹ Hasan, Op.Cit.

⁹² Konflik yang terjadi antara India dan Pakistan sekitar bulan Mei dan Juli 1999 di distrik Jammu dan Kashmir di Kargil. Konflik dimulai dengan infiltrasi pasukan Pakistan dan teroris ke wilayah India. Konflik ini diduga diatur oleh Panglima Angkatan Darat Pakistan yaitu Jenderal Pervez Musharraf yang bertindak tanpa sepengetahuan Perdana Menteri Pakistan, Nawaz Sharif. (<https://economictimes.indiatimes.com>).

⁹³ Risvi, Op.Cit.

untuk mendarat di bandara tersebut maupun bandara dikota-kota besar seperti Lahore dan Islamabad.⁹⁴

Akibatnya militer menyita stasiun TV yang dikelola negara di Islamabad, mengambil alih bandara internasional, memotong jalur telepon internasional, lalu mengepung tempat tinggal Perdana Menteri Nawaz Sharif. Beberapa saat kemudian tersiarkan *soundtrack* kudeta klasik dengan negara bernuansa militer dan rekaman-rekaman parade militer melalui negara sebagai pertanda jatuhnya pemerintahan Nawaz Sharif ditangan militer. Kudeta militer ini juga mendapat dukungan dari hakim ketua Mahkamah Agung Iftikhar Chaudhry dan rakyat Pakistan yang percaya bahwa tindakan Musharraf merupakan sebuah upaya penyelamatan negara Pakistan dari permasalahan negara yang tidak dapat diselesaikan oleh Nawaz Sharif sebagai perdana menteri.

Gerakan cepat yang dilakukan oleh militer menunjukkan bahwa kudeta ini telah direncanakan jauh-jauh hari. Karena menurut pejabat militer, Musharraf dan komandan Korps regional telah melakukan pertemuan pada 18, 21, dan 23 September untuk mendiskusikan tindakan yang akan dilakukan jika Perdana Menteri Sharif bergerak melawan militer.⁹⁵

Setelah negara kudeta terjadi, Jenderal Ziauddin yang direncanakan Nawaz Sharif akan menggantikan Pervez Musharraf sebagai Kepala Militer Pakistan dilucuti dari Pangkat militernya dan ditahan di sel isolasi selama dua tahun di markas Brigade 111. Ini merupakan akibat dari keberpihakkannya

⁹⁴ Tim Weiner, *Countdown to Pakistan's Coup: A Duel of Nerves in The Air*, 17 Oktober 1999, diakses melalui <https://www.nytimes.com/1999/10/17/world/countdown-to-pakistan-s-coup-a-duel-of-nerves-in-the-air.html> tgl 16/05/18 pkl 15.49 WIB

⁹⁵ Ibid.

terhadap Nawaz Sharif sehingga membawanya ke dalam hukuman yang diberikan oleh militer. Ziauddin mulai tidak sepaham dengan jajaran militernya sejak perang Kargil yang membawa Musharraf melakukan tindakan tanpa izin pasukan militer lainnya. Hal ini juga merupakan pemicu buruknya hubungan Nawaz dan Musharraf dimana terdapat rekaman audio yang diserahkan oleh *Intelligence Bureau* (IB) yang berisi Kepala Staf Militer menggunakan bahasa yang mengarah pada penghinaan terhadap perdana menteri.⁹⁶ Militer bisa dikatakan mengalami sedikit keretakan akibat kondisi tersebut, namun tidak terlalu berarti karena kepingannya telah dibersihkan dengan pemberian hukuman pada Ziauddin.

Ketika situasi negara masih dalam tekanan keamanan internal dan eksternal, seharusnya pemerintahan sipil tidak memperkeruh situasi dengan mendorong militer negara garis lapangan. Tindakan Sharif yang cukup gegabah membawanya pada tahap yang diluar ekspektasinya. Karena ketika Pakistan terus menderita akibat tekanan keamanan internal maupun eksternal seperti kekerasan, terorisme, keinginan berperang melawan India, dan lain sebagainya, maka militer akan mengesampingkan pertimbangan lainnya yang mempengaruhi pembuatan kebijakan dan pelaksanaannya demi menjaga dan melindungi keamanan dan stabilitas negaranya.⁹⁷ Sehingga wajar jika kudeta militer kembali terjadi di Pakistan, hal ini kemungkinan disebabkan karena Musharraf merasa negara dan kelompoknya sedang terancam.

⁹⁶ DAWN, Sharif Removed Musharraf After A Phone Call: Gen Butt, diakses melalui <https://www.dawn.com/news/848878> tgl 16/05/18 pkl 16.55 WIB

⁹⁷ RiazHaq, *How Will Musharraf's Indictment Affect Civil-Military Relations in Pakistan?*, Edisi 6 April 2014, diakses melalui <https://defence.pk/pdf/threads/how-will-musharrafs-indictment-affect-civil-military-relations-in-pakistan.307963/> tgl 29/04/18 pkl 17.21 WIB

3.2 Rezim Militer Presiden Jenderal Pervez Musharraf

Pasca melakukan kudeta militer pada 1999 dan langsung menyatakan diri sebagai *Chief Executive*, maka pada tanggal 20 Juni 2001, Pervez Musharraf menyatakan dirinya sebagai Presiden Negara Pakistan sekaligus memegang jabatan sebagai Kepala Staf Angkatan Darat dan Ketua Komite Kepala Staf Gabungan. Selain itu Musharraf juga menyatakan bahwa akan tetap berkomitmen untuk mengembalikan demokrasi ke negara Pakistan.⁹⁸ Tetapi mengembalikan demokrasi di Pakistan tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Apalagi tindakan Musharraf dalam melakukan kudeta militer merupakan salah satu hal yang mencoreng perkembangan demokrasi di Pakistan.

Pada awal statusnya sebagai Presiden Pakistan tepatnya pada 8 Oktober 2001, Musharraf mulai mencoba memperbaiki kondisi eksternal Pakistan yaitu hubungannya dengan India terkait wilayah Khasmir dengan cara melakukan negosiasi. Hingga pada 17 Desember 2001, Pakistan dituduh melakukan serangan bunuh diri di parlemen India, namun kemudian India memberikan kepercayaan kepada Musharraf untuk menumpas kelompok separatis tersebut yang berbasis di Pakistan.⁹⁹

Pasca terjadinya serangan 9 September 2001 di Amerika Serikat, Musharraf mencoba menarik perhatian negara adidaya tersebut. Musharraf membina hubungan dekat dengan Amerika Serikat dalam rangka upaya untuk membasmi ekstrimis islam di wilayah perbatasan Afghanistan-Pakistan. Amerika

⁹⁸ *Profile: General Pervez Musharraf, President Of Pakistan*, Edisi 17 April 2002, diakses melalui <http://edition.cnn.com/2002/WORLD/asiapcf/south/04/17/musharraf.biog/index.html> tgl 29/04/19
pk1 18.35 WIB

⁹⁹ Ibid.

Serikat menjanjikan bantuan sebesar 1 Miliar US Dollar kepada Pakistan sebagai bentuk kerjasama yang telah disepakati. Perekonomian Pakistan pun terselamatkan karena bantuan Amerika Serikat tersebut.

Di awal pemerintahannya sebagai Presiden Pakistan, Musharraf banyak berfokus pada isu keamanan terutama berhubungan dengan nuklir dan Khasmir. Musharraf menegaskan bahwa negaranya tidak akan memulai terjadinya perang karena akan merugikan banyak pihak.¹⁰⁰ Selain itu, terdapat empat hal yang menjadi titik fokus lainnya berkaitan dengan masalah negara di Pakistan menurut Musharraf yaitu pengentasan kemiskinan, kebangkitan ekonomi, pemerintahan yang baik, dan restrukturisasi politik.¹⁰¹ Selain itu Musharraf juga kerap menyampaikan dalam beberapa kesempatan bahwa pemerintahannya akan membangun demokrasi yang abadi dalam tubuh Pakistan meskipun Musharraf memperoleh jabatan dari hasil kudeta militer 1999.¹⁰² Beberapa poin tersebut mengawali pemerintahan Musharraf sebagai bukti bahwa kepemimpinannya akan menyelamatkan Pakistan dari permasalahan-permasalahan yang membelit negara ini dan menghidupkan kembali demokrasi seperti yang diharapkan oleh para pendahulu mereka.

¹⁰⁰ Pervez Musharraf: A History in Power, Edisi 18 Agustus 2008, diakses melalui <https://www.theguardian.com/world/2008/aug/18/pakistan2> tgl 29/04/18 pk1 23.27 WIB

¹⁰¹ President Musharraf and Aga Khan launch the First MicroFinanceBank, Edisi 11 Maret 2002, diakses melalui <http://www.akdn.org/press-release/president-musharraf-and-aga-khan-launch-first-microfinancebank> tgl 30/04/18 pk1 10.12 WIB

¹⁰² Alvin Powell, *Pakistan's Musharraf speaks at KSG*, Edisi 19 September 2002, diakses melalui <https://news.harvard.edu/gazette/story/2002/09/pakistans-musharraf-speaks-at-ksg/> tgl 30/04/18 pk1 10.50 WIB

3.3 Oligarki Militer di Pakistan

Perjalanan periode kepemimpinan Musharraf tidak hanya sekedar berbicara pada upaya untuk memperbaiki negara pemerintahan, mengatasi masalah perekonomian masyarakat, meningkatkan keamanan negara, menjalin hubungan dengan negara tetangga, dan lain sebagainya. Namun jauh lebih dalam dari itu, Pakistan dimasa kepemimpinan Musharraf dihadapkan dengan gelombang pasang dari sisi politik dan pemerintahan terutama berkaitan dengan hubungan sipil-militer.

Pada saat pertama kali menjadi Presiden Pakistan, Musharraf mengatakan akan melakukan pemilihan umum kembali di bulan Oktober 2002 sesuai dengan yang telah di jadwalkan oleh pemerintah untuk memilih kembali pemimpin Pakistan. Namun Musharraf tidak dapat menjamin jika para pemilih nanti masih akan tetap memilihnya sebagai Presiden Pakistan atau tidak. Oleh karena itu, untuk mencegah turunnya Musharraf dari jabatannya sebagai Presiden, maka pada bulan April 2002, diadakanlah referendum yang mengundang para pemilih untuk memberinya masa jabatan 5 tahun lagi memimpin Pakistan.¹⁰³ Tanpa adanya kompetisi karena Musharraf tidak memiliki lawan dalam referendum ini, maka sekitar 98% dari total \pm 54.600.000 pemilih menyatakan mendukung Pervez Musharraf untuk berkuasa 5 tahun kedepan.¹⁰⁴ Hal ini berarti memperjelas perpanjangan waktu kekuasaan Musharraf pada 5 tahun kedepan untuk mengatur dan melanjutkan reformasi ekonomi dan politiknya.

¹⁰³ *Musharraf's referendum Bogus democracy can be worse than none at all*, Edisi 25 April 2002, diakses melalui <https://www.economist.com/node/1098911> tgl 30/04/18 pk1 14.53 WIB

¹⁰⁴ Referendum 2002, Artikel 21 Februari 2004, Diakses melalui <http://storyofpakistan.com/referendum-2002> pada tgl 30/04/18 pk1 15.21 WIB

Pelaksanaan referendum tahun 2002 ini juga menandai awal perubahan konstitusi secara sepihak dari Pervez Musharraf dan pendukungnya. Karena jika mengikuti konstitusi Pakistan, presiden dapat dipilih bukan melalui pemungutan suara secara langsung melainkan harus dipilih oleh anggota terpilih Majelis Nasional, Majelis Provinsi, dan Senat.¹⁰⁵ Fakta lainnya terkait referendum juga diungkapkan oleh *Human Rights Commission of Pakistan (HRCP)* dan wartawan tentang ditemukannya bukti penipuan yang tersebar luas serta pemungutan suara yang dipaksakan dan berulang. Selain itu beberapa karyawan disektor 70 negara dan swasta melaporkan bahwa mereka telah memberikan suara “ya” atas perintah pengawas mereka.¹⁰⁶

Pelaksanaan referendum tahun 2002 tersebut secara tidak langsung jika disimpulkan merupakan pelanggaran konstitusi karena hasil referendum adalah penentuan pemimpin Pakistan dalam hal ini Presiden untuk masa jabatan lima tahun kedepan. Selanjutnya adalah pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan referendum tersebut. Secara jelas bahwa referendum sama halnya pemungutan suara yang mewakili kelompok tertentu untuk memberikan hak suaranya, jika terjadi manipulasi maka secara langsung suara dinyatakan tidak sah. Namun berbeda dengan referendum tahun 2002 yang diselenggarakan oleh pemerintahan Musharraf. Tidak ada perlawanan terhadap kenyataan yang ada karena semua telah dikendalikan dibalik layar.

¹⁰⁵ Ibid.

¹⁰⁶ Human Rights Watch World Report 2003: Asia: Pakistan, diakses melalui pantheon.hrw.org/legacy/wr2k3/asia8.html, tgl 30/04/18 pkl 18.25 WIB

Pada tanggal 21 Agustus 2002 Musharraf mengesahkan dekrit pemerintahannya termasuk perpanjangan masa jabatan kepresidenannya sekaligus sebagai Kepala Staf Angkatan Darat melalui *Legal Framework Order* (LFO). Selain itu, Musharraf juga memberikan kuasa terhadap dirinya sendiri sebagai Presiden untuk memberhentikan Majelis Nasional, menunjuk kepala pelayanan, menyetujui penunjukan hakim pengadilan superior, serta mendirikan Dewan Keamanan Nasional yang nantinya akan melegalkan aktivitas militer dalam dunia politik.¹⁰⁷ Tindakan Musharraf memperpanjang status kepresidenannya melalui referendum yang dianggap menunda pembentukan kembali demokrasi di negara tersebut.

Kepemimpinan Musharraf yang memperlihatkan keberaniannya membuat kebijakan yang banyak mendapat tantangan dari berbagai pihak, contohnya keberpihakan Musharraf terhadap Amerika untuk memerangi terorisme di Afghanistan pada tahun 2001, membuat nyawanya terancam. Pasalnya pada Desember 2003, Musharraf mendapat serangan bom bunuh diri ketika melintas dirute yang selalu dilaluinya. Serangan itu terjadi sehari setelah Jenderal Musharraf mengumumkan akan mengundurkan diri sebagai panglima militer sebelum tahun 2005 dalam sebuah perjanjian dengan partai-partai oposisi Islam garis keras. Sebelumnya telah dicapai kesepakatan dengan partai-partai tersebut untuk mengakhiri kebuntuan selama bertahun-tahun atas 29 amandemen

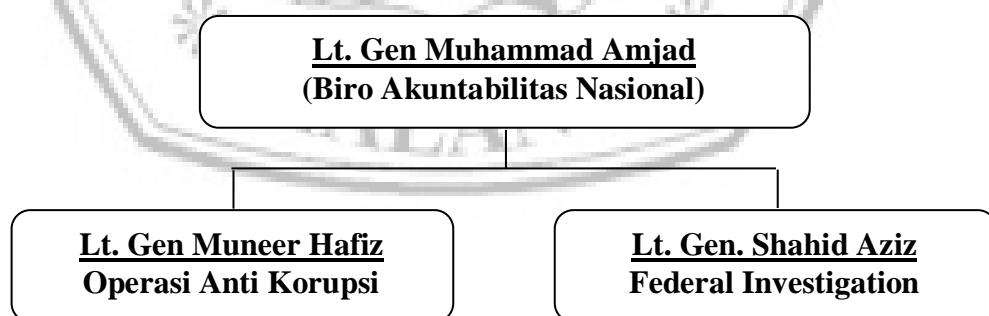
¹⁰⁷ PAKISTAN: TRANSITION TO DEMOCRACY?, ICG Asia Report N°40, 3 October 2002 International Crisis Group, Islamabad/Brussels, diakses melalui https://www.files.ethz.ch/isn/28354/040_pakistan_transition_democracy.pdf tgl 30/04/18 pkl 20.13 WIB

konstitusi presiden secara sepihak diberlakukan pada tahun 2002 karena dinilai ilegal dan telah melumpuhkan parlemen.¹⁰⁸

Selama memimpin negara, Musharraf terlihat menjalankan pemerintahan sesuai dengan kehendaknya tanpa ada rintangan dari pihak manapun walaupun secara jelas dan nyata oposisi tersebar dimana-mana. Musharraf memiliki cara untuk mengatasi pihak-pihak yang tidak sejalan dengannya. Contohnya yaitu Musharraf dapat menekan parlemen untuk menerima LFO yang diajukannya dengan cara mengancam anggota dengan pemecatan. Selain itu, untuk mencegah upaya penolakan terhadap LFO yang diajukannya, Musharraf memberikan penawaran posisi pemerintah kepada pihak-pihak yang bersangkutan agar menerima LFO yang diajukan.¹⁰⁹

Fakta yang sangat jelas adalah selama Musharraf menjadi presiden Pakistan, hampir semua lembaga-lembaga tinggi pemerintahan di pimpin oleh perwira militer. Berikut beberapa lembaga tersebut:¹¹⁰

a. Lembaga Pemberantasan Korupsi



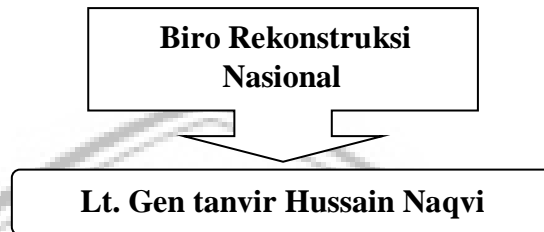
¹⁰⁸ Salman Masood, *Pakistani Leader Escapes Attempt At Assassination*, 26 Desember 2003, diakses melalui <https://www.nytimes.com/2003/12/26/world/pakistani-leader-escapes-attempt-at-assassination.html> tgl 02/05/18 pkl 11.43 WIB

¹⁰⁹ ICG Asia Report N°40, Loc.Cit.

¹¹⁰ Jamshed Khan, Asmat Ullah Wazir, Loc. Cit.

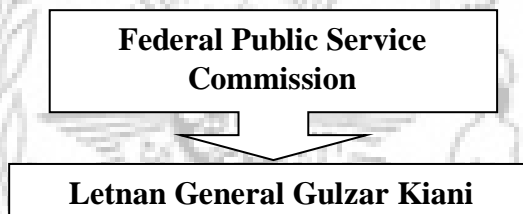
b. Lembaga Federal Independen dan Konstitusional

Tugas dari lembaga ini adalah untuk memulihkan ekonomi, serta melakukan pembangunan melalui sistem pemerintahan lokal.



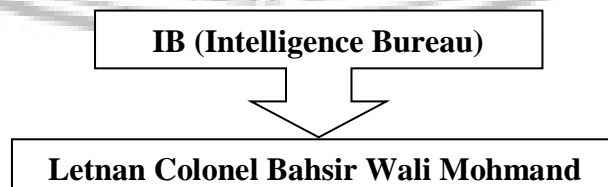
c. Badan Hukum Pemerintah Pakistan

Lembaga ini bertanggung jawab merekrut pegawai negeri dan birokrat di pemerintahan Pakistan.

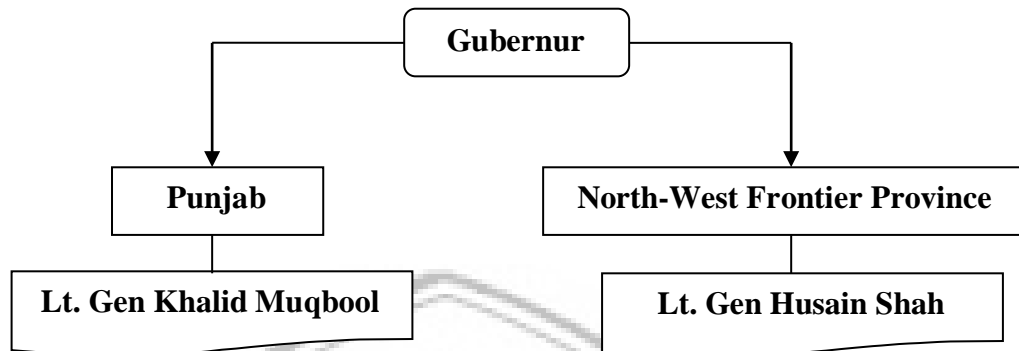


d. Badan Intelijen Sipil Pakistan

Pengangkatan dan pengawasan operasionalnya, lembaga ini di otorisasi oleh perdana menteri.



e. Pimpinan Daerah



Bagan diatas memperlihatkan bahwa pada masa pemerintahan Musharraf sebagai Presiden Pakistan sekaligus kepala Staff Angkatan Darat, keberadaan militer dalam pemerintahan Pakistan telah mendominasi negara ini. Militer menguasai segala aspek dan mengambil peran dalam sektor publik dan swasta termasuk perawatan kesehatan, komunikasi, transportasi, industri, bisnis, pertanian, pendidikan, dan ilmu pengetahuan.¹¹¹

Military oligarchy yang dialami oleh Pakistan disebabkan oleh pengalaman masa lalu negara ini akibat kegagalan koalisi yang terjadi sebelumnya antara Nawaz Sharif dan militer yang menyebabkan terjadinya kudeta dan dilanjutkan dengan pemerintahan yang di pimpin oleh kepala militer yaitu Musharraf yang berusaha mempertahankan pemerintahan dan kekuasaannya melalui kebijakan-kebijakan pro militer yang membuat sipil berada dibawah kontrol pasukan berseragam tersebut.

¹¹¹ Ibid.

3.3.1 Dominasi Militer dalam Pemerintahan Musharraf

Periode pemerintahan Musharraf ketika menjabat sebagai presiden sekaligus kepala militer Pakistan merupakan masa-masa jaya para elit militer. Pasalnya pasca pembentukan *National Security Council* (NSC) oleh parlemen, militer memiliki peran yang permanen dalam pemerintahan. Pembentukan Dewan Keamanan Nasional ini dilakukan oleh Musharraf dinilai sebagai upaya untuk memperkuat demokrasi karena terdapat *check and balances* terhadap presiden, perdana menteri, dan kepala staf militer serta mengurangi kemungkinan terjadinya kembali kudeta militer.¹¹²

Dewan Keamanan Nasional diketuai oleh Presiden yang dibawahnya terdapat tiga kepala bagian pelayanan, perdana menteri, pemimpin oposisi dalam pembicara Majelis Nasional dan ketua senat. Selain itu NSC banyak di dominasi oleh militer dan elit politik yang ditunjuk oleh presiden Musharraf yang mana akan bertugas untuk memberi nasehat kepada presiden terkait permasalahan penting negara termasuk pembubaran Majelis Provinsi.¹¹³ Sehingga secara tidak langsung, NSC akan mengambil alih posisi parlemen yang secara konstitusional diberdayakan untuk melaksanakan kebijakan yang terkait dengan masalah internal dan eksternal.

Kasus pembentukkan NSC ini juga sebelumnya sempat terjadi dimasa pemerintahan Jenderal Zia-Ul-Haq, namun ditentang pembentukannya oleh Majelis Nasional sehingga cita-cita Zia untuk membentuk dewan ini tidak tercapai. Pada dasarnya jika dianalisis kembali, NSC merupakan bagian dari

¹¹² ICG Asia Report N°40, Op. Cit. Hal 23

¹¹³ Ibid.

upaya para komandan militer untuk melegitimasi peran mereka agar lebih luas kedalam sektor-sektor utama seperti pemerintahan, ekonomi dan masyarakat. Musharraf mencoba memproyeksikan militer sebagai penjaga keamanan eksternal dan stabilitas internal, pembangunan ekonomi serta keberlanjutan politik.¹¹⁴

Melalui NSC, militer secara efektif dapat menjalankan peran perwalian tanpa dasar hukum dan konstitusional. Hal ini karena ruang lingkup operasional NSC mencakup semua hal. Penyebabnya adalah NSC diketuai oleh presiden yang sekaligus menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat sehingga hal ini membuat NSC lebih mengarah pada lembaga pengaturan kebijakan daripada membuat rekomendasi kebijakan kepada kabinet federal, seperti yang telah disepakati sebelumnya.¹¹⁵

Perlakuan khusus yang diterima militer dengan memberikan militer posisi-posisi strategis dalam pemerintahan melalui NSC, tentu membuat semakin luas ranah politik yang mendapat intervensi militer. Kekuatan militer semakin besar dan pastinya ini akan berdampak pada ruang gerak sipil yang semakin mengecil, kecuali jika militer berbaik hati untuk membagi kekuasaan dengan sipil. Namun tentu itu terjadi jika militer sedang dalam keadaan terdesak untuk memperoleh dukungan dari publik yang mayoritas adalah masyarakat sipil.

¹¹⁴ Background Paper 2005, *National Security Council: A Comparative Study Of Pakistan And Other Selected Countries*, PILDAT (Pakistan Institute of Legislative Development And Transparency), diakses melalui <http://www.millat.com/wp-content/uploads/pdf/democracy/1/National%20Security%20Council%20.pdf> tgl 06/05/18 pk1 15.24 WIB

¹¹⁵ Ibid.

3.3.2 Pembatasan atas Ruang Gerak Sipil

Perubahan secara hukum dalam LFO 2002 membuat pertikaian politik semakin membesar di Pakistan. Perubahan tersebut membawa sistem negara beralih dari parlementer menjadi presidensil yang bertentangan dengan konstitusi 1973. Secara penuh kekuasaan tertinggi dimiliki oleh Presiden yang sekaligus Kepala Staf Angkatan Darat. Sehingga dengan begitu, maka segala sesuatunya dikontrol oleh Presiden tanpa terkecuali. Selain itu, adanya referendum yang dilakukan pada bulan April 2002 juga ikut mempengaruhi batas ruang gerak sipil karena hasilnya membuat jabatan Presiden Musharraf menjadi lebih lama yaitu bertambah lima tahun. Latar belakang diadakannya referendum ini pun dikarenakan untuk mencegah Benazir Bhutto dan Nawaz Sharif kembali berkuasa serta para kandidat partai dari keduanya yang ikut mencalonkan diri dalam pemilihan.¹¹⁶ Selama proses kampanye pun Musharraf melakukan pembatasan yang sangat ketat terhadap demonstrasi politik. Kebijakan ini kemungkinan baik untuk menekan adanya korban yang berjatuh selama kampanye, namun sisi lain jika membatasi berarti kemungkinan besar para demonstran yang juga berasal dari masyarakat sipil tidak dapat menyampaikan aspirasi mereka dengan maksimal karena ruang gerak yang terbatas.

Adanya 29 amandemen konstitusi yang memperluas kekuasaannya sebagai presiden tentu menghambat berjalannya proses demokratisasi di Pakistan. Ditambah lagi perubahan yang terjadi juga akan melembagakan peran politik militer di dalam politik pemerintahan dengan menempatkannya pada kursi Dewan

¹¹⁶ Inter-Parliamentary Union, *Pakistan Parliamentary Chamber: National Assembly Elections Held In 2002*, di kutip melalui http://archive.ipu.org/parline-e/reports/arc/2241_02.htm, tgl 10/05/18 pk1 23.31 WIB

Keamanan Nasional yang dengan jelas dapat mengubur demokrasi yang telah dijanjikan sebelumnya. Logikanya adalah jika demokrasi yang coba dibangun telah terkubur, sedangkan didalam demokrasi masyarakat memiliki dasar bebas memberikan pendapat, memberikan suara, memilih pemimpinnya, dan masyarakat sipil memiliki hak untuk duduk di posisi pemerintahan, maka bisa jadi poin-poin tersebut juga ikut terkubur. Upaya perpanjangan masa jabatan dan amandemen konstitusi serta pelembagaan peran politik militer dalam Dewan Keamanan Nasional ini bisa jadi merupakan rencana militer untuk membuka jalan bagi sistem politik baru yang akan dijalankan oleh warga sipil tetapi tetap dalam pengawasan militer.¹¹⁷

Politik domestik Pakistan dimasa pemerintahan diktator Musharraf banyak menjadikan tokoh-tokoh besar sipil sebagai bagian dari permainan politiknya. Upaya untuk memuluskan jalannya dalam memperoleh kekuasaan dan menjadikan militer sebagai pusat kekuatan politik dan keamanan Pakistan, pihak Musharraf dan militer membangun kepercayaan publik dengan mencoba meyakinkan bahwa politisi sekuler bukanlah partai agama. Hal ini karena kebanyakan militer mem-branding diri sebagai kekuatan islam yang akan membangun negara berdasarkan nilai-nilai islam sebagai landasan keyakinan. Untuk membatasi ruang gerak kalangan oposisi sekuler, para tokohnya diasingkan dengan hasutan atau dipenjarakan dengan tuduhan korupsi. Sehingga ini memungkinkan partai agama yang dikendalikan oleh militer, mengambil posisi utama di Pakistan hingga akhirnya menggunakan pengaruh yang lebih besar untuk

¹¹⁷ Amir Zia, *Musharraf to Take Over As Pakistan's President*, diakses melalui <https://abcnews.go.com/International/story?id=80901&page=1>, tgl 11/05/18 pk1 00.23 WIB

mengendalikan dan menyerang oposisi politik moderat yang mencoba membangun demokrasi di Pakistan.¹¹⁸

Strategi untuk mempertahankan kedudukan yang dilakukan seperti gambaran diatas kemungkinan terjadi karena media dibawah kepemimpinan Musharraf cukup membantu pihak oposisi. Pada masa kepemimpinan Musharraf, media swasta baru disiarkan didalam negeri, yang kemudian menyiarkan peristiwa-peristiwa dramatis yang sedang berlangsung dan menjadi perhatian dunia internasional. Sehingga melalui media swasta, dukungan internasional bagi gerakan pengacara berdatangan dan oposisi besar-besaran terhadap *statu quo* di Pakistan pun ikut terekspos. Namun sayangnya hal ini memicu pemerintah Musharraf untuk memblokir stasiun swasta tersebut dari transmisi. Sehingga kebebasan pers pun menjadi isu yang diperjuangkan oleh para gerakan media di Pakistan pada masa itu.¹¹⁹

Seiring berjalannya waktu, kekuatan militer dimata sipil mulai melemah. Oposisi semakin berkembang yang menginginkan berakhirnya pemerintahan diktator militer. Hal ini disebabkan tindakan Musharraf yang mengumumkan keadaan darurat pada tanggal 3 November 2007 dan menangguhkan konstitusi serta memecat 2/3 hakim senior Pakistan termasuk Hakim Ketua Mahkamah Agung Iftikhar Chaudhry. Tindakan ini disinyalir merupakan bentuk hukuman atas ketidakpatuhan para hakim yang menentang kebijakan Musharraf untuk

¹¹⁸ Sheila Fruman, 2011, *Will the Long March To Democracy In Pakistan Finally Succeed?*, United States Of Peace, Washington, diakses melalui https://www.usip.org/sites/default/files/resources/Democracy_in_Pakistan.pdf tgl 11/05/18 pkl 09.38 WIB

¹¹⁹ Ibid.

memberlakukan keadaan darurat di Pakistan.¹²⁰ Pasalnya, selain karena keadaan darurat dapat memungkinkan Musharraf untuk memecat parlemen, menangguhkan konstitusi, juga dapat menunda pemilihan, itu berarti kejadian yang sama akan terulang kembali seperti pada tahun 2002, dilakukan referendum untuk perpanjangan jabatan presiden. Para hakim pengadilan selama tujuh tahun, telah mengakomodasi kekuasaan militer Musharraf dengan berulang kali menyerah terhadap masalah hukum dan konstitusi yang di kendalikan olehnya. Termasuk upaya pengubahan konstitusi yang melegalkan Musharraf untuk memperpanjang masa jabatan kepresidenan serta kepala militer. Mengingat masa jabatan Musharraf sebagai Presiden sekaligus kepala militer yang disetujui oleh parlemen sejak tahun 2003 adalah sampai bulan Oktober 2007.¹²¹

Akibat dari pemecatan tersebut terjadi ledakan frustrasi kemarahan dari para pengacara Pakistan yang kemudian melakukan demonstrasi di jalanan untuk menekan pemerintah agar melakukan pemulihan peradilan. Aparat keamanan Musharraf pun melakukan serangan terhadap masyarakat sipil Pakistan khususnya pada komunitas hukum yang memberontak. Dampaknya adalah otoritas Musharraf mulai melemah sehingga harus membuatnya berkompromi dengan beberapa lawan politiknya untuk bertahan hidup demi mengejar ambisinya menjadi penguasa di Pakistan.¹²²

¹²⁰ Human Rights Watch, *Pakistan Events of 2007*, diakses melalui <https://www.hrw.org/world-report/2008/country-chapters/pakistan> tgl 28/05/18 pk1 01.22 WIB

¹²¹ Somini Sengupta, *Musharraf Finds Himself Weakened After Firing of Judge*, diakses melalui <https://www.nytimes.com/2007/03/25/world/asia/25pakistan.html> tgl 28/05/18 pk1 01.32 WIB

¹²² Ibid.

Menjelang pemilihan 2008, upaya untuk berkompromi dengan lawan politiknya tersebut agar tetap dapat berkuasa dan menjadi dominan di Pakistan dibandingkan sipil telah coba dibangun. Salah satunya adalah dengan membuat kesepakatan rekonsiliasi antara Musharraf dan Benazir Bhutto. Kesepakatan ini menandakan pengampunan terhadap Bhutto yang dituding melakukan korupsi selama dua kali masa pemerintahannya.

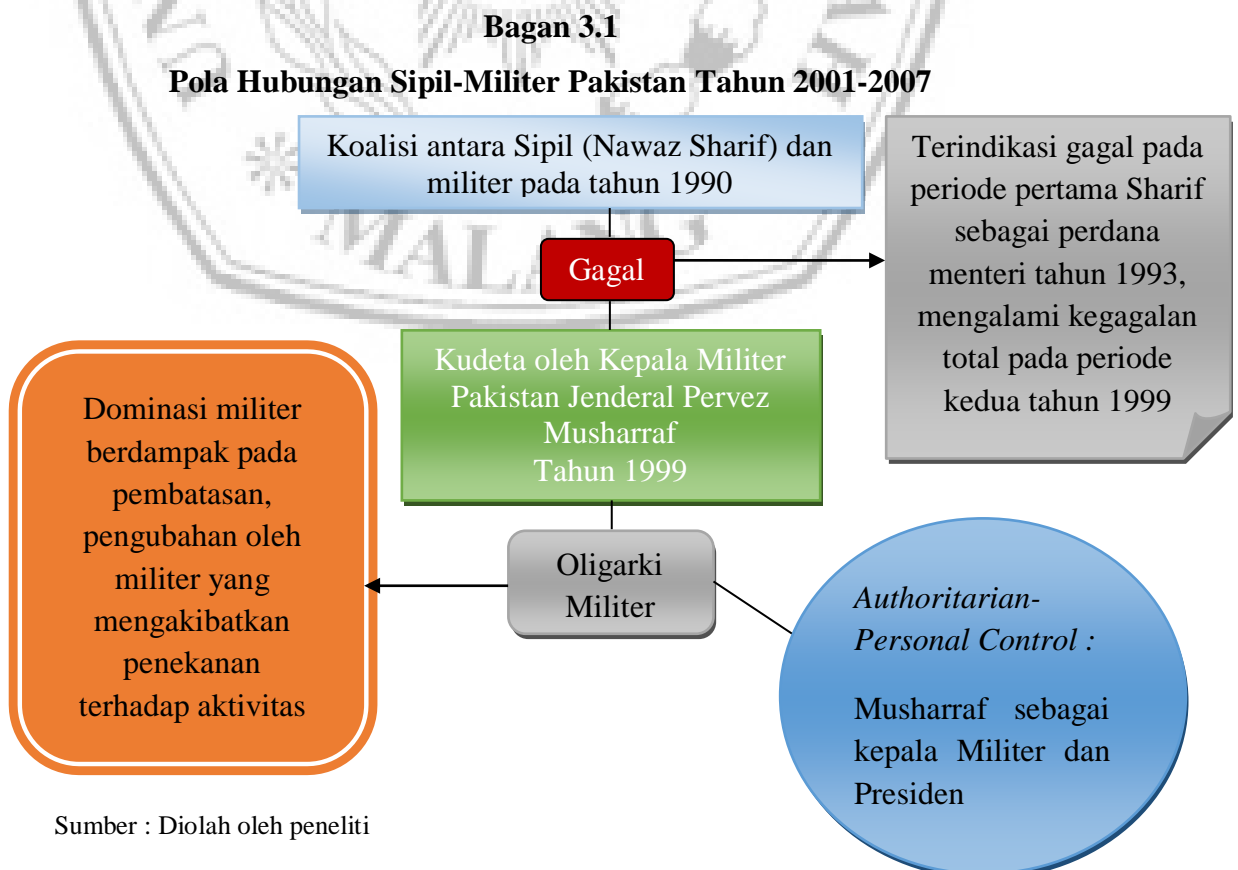
Secara politik, bisa dikatakan bahwa kesepakatan ini merupakan strategi Musharraf untuk mendapatkan kekuasaan kembali karena hasil kesepakatannya mengharuskan Bhutto mendukung Musharraf agar terpilih kembali untuk masa kepemimpinan lima tahun mendatang.¹²³ Walaupun Musharraf berjanji jika terpilih nanti akan melepaskan jabatan panglima militernya dan harus mengubah konstitusi dengan menghapus batasan dua kali terpilih sebagai perdana menteri, tetapi upaya Musharraf untuk berkuasa kembali sangat memperlihatkan ambisinya sebagai seorang dengan latar belakang militer untuk tetap eksis, berkuasa dan berjaya di Pakistan. Hal ini terlihat dari upaya kerja keras yang dilakukan untuk memastikan keberhasilannya dalam merebut kembali posisi tertinggi di Pakistan dengan cara memecat hakim yang dianggap mempersulitnya mendapatkan kekuasaan, kemudian juga memenjarakan lawan-lawan politiknya, serta memberantas para jurnalis kritis yang suka mengkritik kebijakannya.¹²⁴

¹²³ Tempo.co, Musharraf-Bhutto Sepakat Berbagi Kekuasaan, Edisi 5 Oktober 2007, diakses melalui <https://dunia.tempo.co/read/109120/musharraf-bhutto-sepakat-berbagi-kekuasaan> tgl 11/05/18 pkl 11.40 WIB.

¹²⁴ Declan Walsh, *Musharraf bows out to the strains of Auld Lang Syne*, Edisi 28 November 2007, Islamabad, diakses melalui <https://www.theguardian.com/world/2007/nov/28/pakistan.declanwalsh> tgl 20/05/18 pkl 12.22 WIB

Aktivitas politik sipil yang dibatasi dengan cara meletakkan para prajurit militer ke dalam tatanan pemerintahan yang membuat porsi kedudukan sipil semakin sedikit. Hal ini karena diubahnya konstitusi untuk memperkuat dan memperpanjang masa jabatan kepemimpinan diktator Musharraf ikut mengubah aktivitas politik sipil menjadi terbatas dan sulit untuk masuk kedalam instansi pemerintahan. Bahkan para politisi sipil mengalami penekanan hingga pengasingan oleh pemerintahan militer, termasuk kasus terakhir yaitu pemecatan hakim agung. Kondisi ini merupakan dampak dari kepemimpinan oligarki militer yang terjadi. Sehingga birokrasi sipil harus mengatur strategi agar kondisi ini tidak berjalan lama dan oligarki militer dapat segera berakhir walaupun dengan cara mencapai kesepakatan-kesepakatan seperti diatas.

Terkait pola hubungan sipil-militer di Pakistan era Musharraf tahun 2001-2007 dapat dijelaskan dalam bagan berikut :



Pola tersebut menggambarkan hubungan sipil-militer di Pakistan era pemerintahan Jenderal Pervez Musharraf pada tahun 2001 hingga 2007 ketika sang jenderal belum memutuskan untuk menanggalkan status militernya. Pola diatas menjelaskan hubungan sipil-militer sesuai dengan tipe yang digolongkan oleh Morris Jannowitz, dimana dampak dari gagalnya koalisi sipil dan militer, menyebabkan munculnya oligarki militer yang dalam konteks negara Pakistan, diawali oleh kudeta militer. Adanya oligarki militer membawa dampak yang signifikan terhadap hubungan sipil-militer. Militer menjadi lebih dominan, dan aktivitas sipil mengalami penekanan dan pembatasan dalam politik.

